

Quiz I : Demokrasi

Setiap kali ada pemilu baik pemilu legislatif dan pemilu presiden, harapan kita muncul, semoga pemimpin dan wakil rakyat kita dapat membawa kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Namun untuk yang kesekian kalinya kita dikecewakan dengan kondisi yang ada di depan mata kita. Dalam tahun 2005 saja kita mengalami kenaikan BBM dua kali, dan rasanya persoalan-persoalan kehidupan ini semakin sulit saja untuk dipecahkan.

Pertanyaannya : Salalahkah dengan demokrasi kita? Bagaimana sebenarnya demokrasi itu?

Jawab :

Demokrasi:

Jika manusia adalah malaikat, tidak perlu ada pemerintah

Haruskah memberikan suara dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia? Bukankah sebagian calon anggota legislatif telah dikategorikan sebagai politisi busuk? Oleh karena itu, bukankah wajar jika menjadi pesimis dengan kondisi itu, lalu tidak memberikan suara pada hari pemilihan?

Rangkaian pertanyaan berupa gugatan ini kerap diungkapkan kelompok pemilih kritis yang terdidik dan umumnya ada di perkotaan.

Ada tiga argumentasi untuk menyatakan kekecewaan pemilih kritis, Namun hal ini jangan diterjemahkan dalam perilaku tidak memilih, mengancam demokrasi, atau memimpikan masa lalu kembali.

Pertama, demokrasi tidak mengasumsikan calon anggota legislatif (caleg) atau politisi sebagai malaikat. Justru demokrasi berangkat dari asumsi hakikat manusia adalah haus kekuasaan serta mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Adalah dengan asumsi semacam ini, demokrasi yang dijalankan, salah satunya melalui instrumen pemilu, bukan ditujukan untuk memilih para malaikat, tetapi memilih manusia biasa dengan seluruh ketidaksempurnaannya. Karena itu, kontribusi terbesar dari demokrasi adalah memberikan kemerdekaan (*liberty*) bagi manusia untuk berbeda pendapat, menyatakan kepentingannya, membentuk kelompoknya, mengaspirasikan hasrat kekuasaannya dengan tujuan mencegah terjadinya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain [1].

Dalam rumusan berbeda, demokrasi justru amat dibutuhkan untuk mengendalikan hasrat haus kekuasaan. Sebaliknya, bentuk pemerintahan di luar demokrasi, seperti autokrasi dan monarki, justru menciptakan ruang yang hampir tidak terbatas untuk memenuhi hasrat kekuasaan itu. Demokrasi disebutkan membawa dua kegembiraan bagi manusia karena dua alasan. Alasan pertama karena demokrasi mengakui keragaman. Alasan kedua karena demokrasi mengizinkan adanya kecaman [2].

Kedua, mengingat demokrasi bukan untuk para malaikat, demokrasi sebagai hasil karya manusia tentu memiliki kelemahan. Satu di antara kelemahan utama muncul dari kemerdekaan untuk melakukan pengelompokan (*factions*), misalnya, terlihat dari banyaknya partai. Kehadiran berbagai fraksi menciptakan suasana permusuhan yang pada akhirnya membuat proses pembuatan keputusan menjadi amat lambat. Kelemahan

semacam ini jangan diatasi dengan menghilangkan sebab-musababnya (*removing its causes*) [3].

Menghilangkan sebab-musabab sama dengan memberi saran membunuh kemerdekaan sendiri atau pilihan lain mengharuskan semua orang untuk memiliki pendapat, hasrat, dan kepentingan yang sama. Membunuh kemerdekaan berarti membunuh demokrasi, sementara pilihan lain sama sekali tidak dapat diterapkan karena mengingkari hakikat keragaman manusia. Karena itu, pilihan realistis yang dilakukan adalah dengan mengendalikan akibatnya (*controlling its effect*). Banyak cara dapat dilakukan untuk mengendalikan akibatnya itu, misalnya, dengan membuat garis pemisah yang jelas antara ketiga cabang kekuasaan pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya agar tak ada satu pun cabang kekuasaan menjadi amat dominan terhadap yang lainnya, yang dikenal dengan istilah menerapkan mekanisme *checks and balances* [3].

Ketiga, kekecewaan terhadap kualitas politisi dalam pemerintahan demokrasi adalah sesuatu yang wajar, bukan khas Indonesia. Semakin sedikit para pemilih di negara maju memberikan suaranya dalam pemilu sebagai refleksi kekecewaan mereka terhadap politisi. Namun, ini tidak berarti mereka kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Juga sebaiknya jangan diartikan politisi masa lalu lebih baik daripada politisi sekarang [4].

Yang terjadi sebenarnya, arus informasi yang lebih besar dan terbuka mengakibatkan skandal dan korupsi para politisi kini menjadi lebih sukar ditutupi daripada periode waktu lima puluhan. Dengan logika semacam ini, ada satu catatan menarik yang pantas digarisbawahi sehubungan informasi tentang politisi busuk. Terlalu gegabah dan terburu menafsirkan, politisi sebelum masa reformasi menjadi lebih baik daripada politisi sekarang. Atau dalam kalimat yang amat sarkastis, politisi antek Orde Baru menjadi lebih baik. Justru yang harus disimpulkan adalah informasi tentang politisi busuk itu dimungkinkan keluar karena proses demokrasi yang sedang dikembangkan. Informasi semacam ini pasti tak dapat dipaparkan secara luas kepada publik dalam masa Orde Baru. Ringkasnya, gagasan untuk tidak memilih karena informasi politisi busuk menjadi gagasan yang tidak tepat [4].

Dengan tiga argumentasi itu, proses politik demokratis yang dilakukan melalui pemilu sebaiknya tidak melulu dipahami dalam kerangka normatif, tetapi juga dalam kerangka realistis. Harapan pemilu dapat menyelesaikan seluruh persoalan negeri ini mungkin berangkat dari pemikiran normatif, yang jika tidak hati-hati akan membawa kita ke dalam jebakan pemikiran utopis.

Kita membutuhkan pemerintahan justru karena kita sebagai manusia, bukan malaikat. Dalam tataran amat praktis, ini berarti ada keharusan untuk melakukan proses deskaralisasi atas seluruh caleg partai.

Tidak berlebihan untuk menyatakan, siapa pun tokoh pemimpin partai, mereka adalah manusia biasa. Apakah itu Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, mereka pasti memiliki ketidaksempurnaan seperti layaknya manusia. Mereka pasti dan akan pernah melakukan kekeliruan dalam satu momen kehidupannya. Mereka juga pasti memiliki hasrat terhadap kekuasaan, yang setelah diperoleh selalu ada bujukan untuk menyalahgunakannya.

Dengan pemikiran semacam ini, yang perlu menjadi agenda utama para pemilih kritis bukan pada isu memilih atau tidak memilih, tetapi bagaimana membuat demokrasi yang sedang kita jalani menjadi lebih relevan bagi kehidupan publik.

Untuk itu, disarankan kebutuhan untuk mendemokraskan demokrasi (*democratizing democracy*) [4]. Hal ini, misalnya, dapat dilakukan dengan melanjutkan devolusi kekuasaan dari tataran nasional ke tataran lokal sehingga kekuasaan menjadi lebih dengan masyarakat. Cara lain dengan melanjutkan tindakan antikorupsi pada seluruh lapisan dan terus mendorong transparansi yang lebih besar dalam isu-isu politik yang mempengaruhi publik [5].

Bahan Acuan :

- [1] Tuti James Madison, *Demokrasi Para Malaikat?*, Kompas, Kamis, 01 April 2004
- [2] EM Foster, penulis Inggris
- [3] Madison, seorang pemikir politik Amerika Serikat, dalam *Federalist Papers*
- [4] Anthony Giddens, *Runaway World*, 1999
- [5] Makmur Keliat, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Quiz II : Subsidi BBM

Setelah BBM naik, pemerintah akan mengucurkan dana sebagai subsidi BBM kepada rakyat miskin.

Pertanyaannya : Tepatkah kebijakan tersebut? Adakah mekanisme yang bagus untuk menyalurkan subsidi BBM?

Jawab :

Kalau kita melihat rakyat miskin di Indonesia, dapat digolongkan menjadi orang yang miskin karena tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan tetap dan orang miskin karena memang tidak memiliki penghasilan sama sekali.

Golongan miskin pertama adalah orang miskin yang memiliki pekerjaan, meskipun memiliki pekerjaan, namun kondisinya masih labil, karena pada suatu saat penghasilannya kurang dari kebutuhannya. Sehingga mereka tidak mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya, bahkan untuk sekedar makan.

Golongan miskin kedua adalah benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Tanpa adanya kenaikan BBM, golongan kedua ini sudah jelas sudah dapat memenuhi kebutuhan hariannya. Apalagi jika BBM dinaikkan, mereka semakin terjepit dan pasti tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Subsidi BBM dapat bentuk uang tunai, tentu akan bermanfaat bagi golongan pertama ketika penghasilannya sedang kurang, dan untuk golongan kedua jelas sudah pasti dibutuhkan.

Namun demikian, pemberian bantuan dalam bentuk "uang mentahan" **saja** seperti di atas merupakan tindakan yang kurang mendidik [1], karena permasalahan kemiskinan di Indonesia ini tidak cukup hanya diberi uang kemudian rakyat dapat membeli kebutuhannya [2].

Bangsa Indonesia memang banyak orang miskinnya, namun kita dapat mendidik mereka menjadi orang yang dapat berdiri dengan kakinya sendiri atau mandiri [3]. Kita tidak perlu membuat program yang muluk-muluk untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Jika kita punya modal, kita dapat memberi mereka modal untuk usaha yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jika mereka hanya mampu menjadi penjual bakso, kita cukup memberi modal mereka untuk berjualan bakso. Tidak harus kita menyuruh mereka untuk bekerja di pabrik, karena mereka tidak memiliki *skill* di sana.

Jadi yang kita butuhkan adalah juga adanya *scheme* untuk penyediaan modal bagi rakyat kecil sesuai dengan kemampuan pekerjaannya dapat mereka lakukan.

Kita dapat ambil contoh di Magelang. Di Magelang ada sebuah yayasan bernama Yayasan Pembina Kharisma [4]. Yayasan ini membuat satu lembaga semacam bank syariah, bernama BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Kharisma. BMT ini bertugas menghimpun dana dari zakat, shadaqah, dan infaq. Selain itu BMT juga menerima

tabungan dari nasabah serta mengadakan kerja sama usaha dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan profit.

BMT Kharisma juga membantu para pedagang kecil, dengan memberi bantuan modal bagi para pedagang kecil dan pedagang kaki lima (PKL), dengan sistem bagi hasil. Dengan pemberian modal beberapa ratus ribu, para pedagang kecil sangat merasa bersyukur dapat memperoleh bantuan modal dengan proses yang tidak berbelit-belit. Dari bagi hasil usaha itu, ada potongan untuk zakat/infaq sebesar 2,5%.

Bagi pedagang kecil/PKL yang memiliki anak yang sedang sekolah dan memiliki prestasi bagus di sekolah diberi bantuan beasiswa yang diambilkan dari infaq/shodaqoh.

BMT Kharisma ini telah membuktikan bahwa dengan cara demikian, dari tahun 1995 berdirinya BMT yang hanya memiliki modal Rp 1,3 juta saja, saat ini (tahun 2005) perputaran dana yang ada di sana lebih dari Rp 2 milyar! Dan BMT yang semula hanya menyewa tempat, kini mampu membeli kantor sendiri dengan harga Rp 400 juta lebih.

Ingin contoh lagi?

Contoh ini terjadi di Mesir. Ada dua orang kakak beradik ini menghimpun dana dengan membuat semacam lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shodaqoh. Kedua kakak beradik ini memutarakan dana tersebut menjadi dana bergulir untuk usaha penduduk yang ada di kampungnya tersebut. Setelah berjalan sekitar 30 tahun, hampir seluruh penduduk kampung itu sudah memiliki usaha sendiri dari hasil dana yang digulirkan tersebut. Bahkan kampung tersebut dapat mendirikan suatu universitas yang menjadi cabang dari Universitas Al Azhar [5].

Dengan contoh di atas, sebenarnya kita dapat belajar dari BMT Kharisma Magelang dan dua orang dari Mesir. Kita dapat memberi "ikan", sekaligus "kail"-nya juga. Keduanya diperlukan. Sekarang tinggal membagi saja dana subsidi BBM yang jumlahnya 89,3 trilyun [6], menjadi dua *scheme*, *scheme* jaring sosial dan *scheme* untuk dana bergulir.

Selanjutnya, bagaimana mekanisme penyaluran dana subsidi BBM tersebut. Menurut saya, cara yang sudah dilakukan sekarang sudah termasuk bagus. Mengingat tidak seluruh daerah di Indonesia tidak terdapat bank, maka bagi daerah-daerah yang tidak ada BRI disalurkan lewat kantor pos.

Namun demikian, kita sebenarnya dapat mengkombinasi dengan cara membuat rekening di bank, sehingga rakyat yang mendapatkan bantuan tersebut dapat langsung menabung di bank yang bersangkutan. Selain itu cara ini dapat mengurangi antrian di loket pada waktu yang sama.

Bahan Acuan :

- [1] Tuti Adhitama, *Editorial Media Indonesia*, Metro TV, 1 Oktober 2005,
- [2] Komisi, Radio Elshinta, edisi dini hari, 27 September 2005
- [3] Wawancara dengan Didi Achjari, Phd, M.Com, Dosen Fakultas Ekonomi UGM, 1994
- [4] Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Kharisma, Yayasan Pembina Karisma, 1995-2005
- [5] MQ Muamalah, Radio MQ, sore, September 2005
- [6] Subsidi BBM Rp 89 Trilyun, Jawa Pos, halaman 1, 28 September 2005

Quiz III : Password

Kalau kita memiliki banyak *password*, menjadikan kita sering lupa dengan *password-password* tersebut

Pertanyaan :

Bagaimana caranya agar kita bisa mengingat *password* kita, bila kita lupa tanpa khawatir bahwa *password* tersebut diketahui orang lain?

Jawab :

Ada beberapa cara untuk mengatasi kelupaan *password*, dua cara dapat diungkapkan di bawah ini.

- a. **Cara I.** Dalam aplikasi untuk *user* kita dapat memberikan isian lebih dari satu buah *password* yang berbeda. Misal dengan isian seperti berikut:

Isikan password Anda!			
Password I	<input type="text"/>	Cek Password I	<input type="text"/>
Password II	<input type="text"/>	Cek Password II	<input type="text"/>
Password III	<input type="text"/>	Cek Password III	<input type="text"/>

Dalam program, kita buat dengan menggunakan operator OR untuk memilih salah satu *password* yang benar, misal

```
If password == password1 OR password == password2 OR  
password == password3  
    Statement bila pernyataan benar  
Else  
    Statement bila pernyataan salah  
Endif
```

Dengan cara ini, bila *user* lupa dengan *password* I, dia masih dapat login dengan *password* II atau *password* III.

- a. **Cara II.** Dalam aplikasi untuk *user*, kita dapat memberikan pertanyaan bagi *user* dan jawaban yang diberikan *user* mengarah pada petunjuk jawaban kira-kira isi dari *password* tersebut.

Misal :

- Kalau *password* kita adalah **kitty**
- Kita dapat memberi pertanyaan : “Apa warna kucing Budhe?”